

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu upaya untuk mencari perbandingan untuk ide baru penelitian selanjutnya. Bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Pada penelitian ini akan menggunakan penelitian sebelumnya untuk acuan yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. **Addin Nurma Rahmitasari, Nur Fadjrih Asyik (2023)**

Dengan judul “Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah yang didapatkan, maka semakin tinggi pula belanja modal. Namun untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya pengalokasian belanja modal tidak dipengaruhi oleh besarnya dana yang diberikan pemerintah

pusat. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan yaitu menggunakan variabel dependen (y) yaitu belanja modal
- b. Kesamaan variabel independen (x) yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu pendapatan asli daerah.
- c. Kesamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen (x) yaitu DAU dan DAK sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan dana perimbangan.
- b. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2018-2021, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2022.

2. Vivi Oktavia, Dewi Zulvia (2023)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah (X_1) dan Dana perimbangan (X_2) terhadap Pertumbuhan

ekonomi (Y). Sampel yang digunakan penelitian ini pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dan Dana perimbangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2019-2021.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel independen (x) yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- b. Periode penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang menggunakan tahun menggunakan tahun 2019-2022.
- c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen (y) yaitu pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian sekarang menggunakan belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 19 Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

c. Penelitian terdahulu tidak memiliki variabel moderating dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderating pertumbuhan ekonomi

3. Arnab Acharya, Carrie Wolfson, Sasmira Matta, Carolina Cardona, Sneha Lamba, David Bishai (2021)

Dengan Judul "*The Role of Public Health Expenditures in COVID-19 control: Evidence from Local Governments in England*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa apakah tingkat pendanaan kesehatan masyarakat berkorelasi dengan pengendalian gelombang pertama pandemic COVID-19 yang lebih cepat antara bulan Maret dan Juli 2020. Sampel yang digunakan adalah Pemerintah Daerah di Inggris. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan variabel independent (x): Pengeluaran Kesehatan. Adapun variabel dependen (y): Pengendalian Masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pada 26 Juli 2020, ada 147 UTLA di Inggris yang melaporkan lebih dari 10 kasus COVID-19. Dua puluh lima dari daerah-daerah ini mencapai puncak kejadian infeksi dalam waktu seminggu, dengan distribusi non-normal. Rata-rata (standar deviasi) jumlah hari ke puncak adalah 22 (15,76) dalam sampel penuh 147 dengan maksimum 112 hari dan median 20. Namun, tidak semua 147 UTLA dapat digunakan dalam analisis karena hasil mengenai distribusi data seperti yang dijelaskan di bawah ini (Lihat juga Lampiran II). Sampel analitik akhir dikurangi menjadi 136.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan penelitian terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menjelaskan tentang pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan penurunan ekonomi.
- b. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan penelitian kuantitatif.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen (y) yaitu pengendalian masyarakat. Namun, pada penelitian ini menggunakan belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Pemerintah Inggris. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan kabupaten pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Rendy Alvaro (2022)

Dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Daerah Tertinggal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, modal belanja daerah, dana daerah untuk urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi

umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, serta dana urusan pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan memengaruhi. Namun, variabel belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Variabel independen (x) yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu pendapatan asli daerah.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen (y) yaitu pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian sekarang menggunakan belanja modal dan menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen (x) yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- c. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2015-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2022.

5. Alfina Fadhila Soesilo, Nur Fadjrih Asyik (2021)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai

Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, bantuan provinsi, dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 daerah tertinggal di Indonesia. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar pendapatan asli daerah yang didapatkan maka semakin besar pula belanja modal. Bantuan provinsi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya pengalokasian belanja modal tidak dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh dana yang diberikan pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh bantuan provinsi terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal. tidak dapat memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen (y) yaitu belanja modal.
- b. Variabel independen (x) yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu pendapatan asli daerah.

- c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen (x) yaitu PAD, Bantuan Provinsi, DAK sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
- c. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2017-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2022.

6. Andrew Abbott a dan Philip Jones (2020)

Dengan judul *“Government response to increased demand for public services: The cyclical nature of government health expenditures in the OECD”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan cara pemerintah memaksimalkan suara memengaruhi siklus pengeluaran perawatan kesehatan pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan penurunan ekonomi. Sampel yang digunakan adalah siklus pengeluaran kesehatan pemerintah, negara-negara OECD dari tahun 2000 hingga 2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan variabel independen (x) : Tanggapan pemerintah terhadap meningkatnya permintaan akan layanan publik. Adapun variabel dependen (y): Pengeluaran kesehatan pemerintah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 8 mungkin secara tidak langsung dipengaruhi oleh pengeluaran untuk Kesehatan. Oleh karena itu kami menaksir ulang (10) total pengeluaran untuk Perlindungan Sosial dikurangi tunjangan yang dibayarkan untuk 'Penyakit & Cacat'. Hasilnya, tersedia atas permintaan, menunjukkan asiklikalitas dalam kemerosotan ekonomi, hasil yang masih memungkinkan kita untuk mendukung hipotesis.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menjelaskan tentang pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan penurunan ekonomi.
- b. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan penelitian kuantitatif.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen (y) yaitu layanan publik. Namun, pada penelitian ini menggunakan belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel kesehatan pemerintah, negara-negara. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
- c. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2000-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2021.

7. Stephen Taiwo Onifade, Savas Cevik, Savas Erdogan¹, Simplice Asongu, and Festus Victor Bekun (2020)

Dengan judul “*An empirical retrospect of the impacts of government expenditures on economic growth: new evidence from the Nigerian economy*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi Nigeria sambil mempertimbangkan pendapat yang berbeda dari literatur yang ada. Sampel yang digunakan adalah menggunakan data deret waktu dari tahun 1981 sampai 2017 yang mencakup jangka waktu 37 tahun. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan variabel independent (x) Pengeluaran Publik, . Adapun variabel dependen (y) :Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hasil ekspansi fiskal pemerintah yang bertumpu pada pembiayaan utang sangat besar menyebabkan pengeluaran publik dan investasi domestik juga berpengaruh pada perekonomian.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menjelaskan tentang pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan penurunan ekonomi.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan penelitian kuantitatif.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen (y) yaitu layanan publik. Namun, pada penelitian ini menggunakan belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Pemerintah Nigeria. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan kabupaten pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
- c. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 1981-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2021.

8. Rendy Alvaro, Adhi Prasetyo (2020)

Dengan judul “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating pada Provinsi di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi agar dapat mendukung keputusan yang terbaik dalam mencapai tujuan target yang diinginkan dalam pembangunan. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan 33 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAK, DBH berpengaruh positif signifikan terhadap modal pengeluaran. DAU tidak mempengaruhi belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, ekonomi pertumbuhan memoderasi PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap modal belanja negara, namun

pertumbuhan ekonomi dimoderasi DAK dan DBH yang signifikan dampak negatif terhadap belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen (y) yaitu belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen (x) yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 33 Provinsi di Indonesia. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
- b. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2016-2020, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2022.

9. Sukma Ayu Mahardika, Ikhsan Budi Riharjo (2019)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang

digunakan penelitian ini menggunakan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 114 data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen (y) yaitu belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen (x) yaitu pendapatan asli daerah.
- c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel (x) pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
- c. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2022.

10. Irwan, Mursalim, Nurwanah (2019)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating tidak dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, sementara hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dapat memoderasi dalam pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal tetapi berpengaruh negatif.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen (y) yaitu belanja modal.

- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen (x) yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
- b. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2016-2020, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2022.

11. Irene Kristianti U.L (2019)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal serta dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui modal pengeluaran. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur pada tahun tersebut tahun 2010-2015 dengan jumlah sampel 228 orang. Hasil penelitian ini pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga secara tidak langsung mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui modal

belanja, dana perimbangan secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap perekonomian pertumbuhan melalui belanja modal, dan juga belanja modal negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen (y) yaitu belanja modal.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen (x) yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, pada penelitian yang sekarang menggunakan 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
- b. Periode penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2010-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019-2020.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Independen (x)		Variabel Moderasi (z)
		PAD	Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi
1.	Addin Nurma Rahmitasari, Nur Fadjrih Asyik (2023)	B	-	TB
2.	Vivi Oktavia, Dewi Zulvia (2023)	TB	B	B
3.	Arnab Acharya, Carrie Wolfson, Sasmira Mat, Carolina Card, Sneha Lamba, David Bishai (2021)			
4.	Rendy Alvaro (2022)	B	-	B
5.	Alfina Fadhila Soesilo, Nur Fadjrih Asyik (2021)	B	-	TB
6.	Andrew Abbott a dan Philip Jones (2020)	-	-	B
7.	Stephen Taiwo Onifade, Savas Cevik, Savas Erdogan1, Simplice Asongu, and Festus Victor Bekun (2020)	-	-	B
8.	Rendy Alvaro, Adhi Prasetyo (2020)	B	-	B
9.	Sukma Ayu Mahardika, Ikhsan Budi Riharjo (2019)	TB	-	B
10.	Irwan, Mursalim, Nurwanah (2019)	B	B	TB
11.	Irene Kristianti U.L (2019)	B	B	B

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Steward

Teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pihak pemberi amanah (*principal*). Selain itu, penerima amanah (*steward*) tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain, hubungan yang terjadi antara *principal* dan *steward*, dalam hal ini masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur terhadap pihak lain (Steward, 1972).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah. Eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dalam penelitian ini teori *stewardship* digunakan dalam hipotesis pada, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Belanja Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:31) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran

lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

2.2.3.1 Belanja Operasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis-jenis belanja operasi:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja barang/jasa
- d. Belanja bunga
- e. Belanja subsidi
- f. Belanja hibah
- g. Belanja bantuan sosial

2.2.3.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang menambah aset atau inventaris yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode (12 bulan) berdasarkan periode akuntansi (Khusaini, 2018:163). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Peran belanja modal sangat penting di daerah, dengan adanya pembangunan mampu membuat daerah menjadi berkembang sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah. Belanja modal digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah seperti belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Dalam hal ini pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh publik demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah ataupun untuk fasilitas publik. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2.2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Menurut Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran

tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

2.2.3.4 Belanja Transfer

Menurut Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Belanja bagi hasil yaitu dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bantuan keuangan yaitu diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.2.3. Pendapatan Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:31), Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 terdiri dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah**
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. **Dana Perimbangan**
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah**
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah supaya dirasakan oleh masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk sebagai pendapatan yang di peroleh daerah yang di kutip berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengkaji keuangan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini daerah khususnya provinsi diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Retribusi daerah apabila dikelompokkan ke dalam objek terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pada jenis pendapatan ini dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, Pendapatan Denda (BPHTB), pendapatan denda retribusi, pendapatan denda hasil eksekusi atas jaminan, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

2.2.3.2 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

Jadi, dana perimbangan adalah salah satu hal penting bagi kemajuan daerah. Dana perimbangan digunakan untuk membantu suatu ketimpangan di daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya dan membantu daerah dalam mendanai kewarganegaraannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari beberapa bagian seperti :

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu.

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan pendapatan transfer.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Darurat

Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukan (Kuznets, 2016). Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dalam produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha disuatu daerah dalam satu periode tertentu. Perhitungan produk domestik regional bruto menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berjalan (BPS, 2023). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian utama dalam pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses multidimensional. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jumlah dan jenis barang-barang ekonomi kepada masyarakat (Firdausy, 2017:43)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Secara umum jenis PAD antara lain retribusi daerah, pajak badan usaha milik daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk membiayai otonomi daerah. Biaya otonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui belanja modal yaitu dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana. Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintah, pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya untuk bisa membiayai kebutuhan belanja daerahnya sendiri. Peningkatan pendapatan asli daerah akan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga untuk meningkatkan belanja modal untuk pelayan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan landasan teori dan penemuan hasil empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

2.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana yang akan mempercepat pembangunan daerah apabila pengadaan tersebut dilaksanakan melalui belanja modal. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan pelayanan publik. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan yang meningkat akan mampu menunjang belanja modal yang belum dapat dilakukan oleh daerah karena keterbatasan anggaran kemampuan setiap daerah tentunya berbeda, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD.

Dana perimbangan untuk menjadikan pemerintah daerah dapat memanfaatkan secara maksimal dalam potensi daerah agar dapat membiayai pengeluarannya sendiri. Dengan demikian dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, yaitu semakin tinggi nilai dana perimbangan maka semakin tinggi nilai belanja modal. Menurut penelitian Vivi Oktavia (2023) dan Irwan (2023) mengatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan landasan teori dan penemuan hasil empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian menurut Rendy Alvaro (2020) dan Kristianti, (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan penemuan hasil empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan dimoderasi pertumbuhan ekonomi

2.3.4 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi.

Semakin meningkatnya dana perimbangan akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal yang meningkat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dapat berpengaruh dalam merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan berkaitan dengan dana perimbangan yang diterima oleh daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka berarti penghasilan yang diterima daerah dari pendapatan asli daerah akan semakin besar, sehingga kemungkinan memperoleh dana perimbangan khususnya dana alokasi umum yang lebih tinggi dalam hal pemerataan juga akan berkurang. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi merupakan variabel pemoderasi dalam pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperlemah pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan transfer dana pada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana Transfer dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pemerintah daerahnya. Penelitian menurut Irwan (2022) dan Rendy Alvaro (2020) mengatakan bahwa hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel

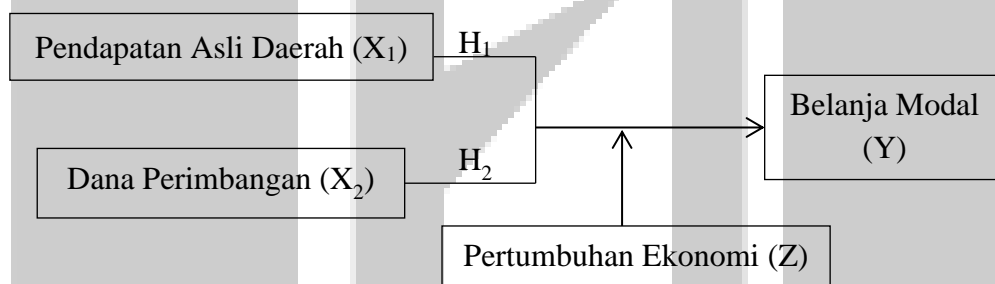
moderating dapat memoderasi dalam pengaruh data perimbangan terhadap belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan penemuan hasil empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja modal dengan dimoderasi pertumbuhan ekonomi

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hubungan antar variabel, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y) dengan variabel moderasi (z) sebagai berikut :



Sumber: diolah, 2023

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran